

# TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA DISRUPSI

## *POVERTY ALLEVIATION CHALLENGE IN DISRUPTION ERA*

**Mira Azzasyofia**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,  
Jl. Ir. H. Juanda No,367 Bandung, Indonesia, 40135  
**E-mail:** mirazzasyofia@poltekesos.ac.id

### **Abstrak**

Era disrupsi menuntut perubahan cepat di berbagai aspek kehidupan akibat inovasi teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Perumusan hingga implementasi serta evaluasi kebijakan semakin memanfaatkan TIK. Namun, proses ini tidak sejalan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Padahal, kemiskinan adalah masalah sosial yang perlu diatasi sebagaimana dimuat dalam tujuan pertama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meniadakan kemiskinan pada tahun 2030. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dijadikan alat untuk membantu membuat kebijakan ataupun program yang dapat membantu untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemberian akses terhadap TIK oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, akan mampu membuat mereka mendapatkan informasi yang tepat guna dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka serta terlibat dalam pembangunan dan terlepas dari kemiskinan. Berdasarkan kajian literatur disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi perlu melihat peluang dari perkembangan TIK dalam program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 yang juga telah memperluas penggunaan TIK di Indonesia perlu dimanfaatkan dengan membuat program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan era digital. Pemanfaatan TIK perlu juga digunakan untuk mengembangkan berbagai pelatihan pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan penggunaan alat-alat digital untuk hidup lebih produktif di seluruh pelosok Indonesia.

**Kata Kunci:** kemiskinan, era disrupsi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sustainable development goals.

### **Abstract**

*The era of disruption demands rapid changes in various aspects of life due to technological, information, and communication (ICT) innovations. Nowadays, from the formulation to implementation and evaluation of policies, increasingly utilizing ICT. However, this process is not in line with poverty reduction in Indonesia. At the same time, poverty is a social problem that needs to be overcome, as contained in the first goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) to eliminate poverty by 2030. In tackling poverty, the use of Information and Communication Technology (ICT) can be used as a tool to help make policies or programs that can help reduce poverty. Providing access to ICT by the community, especially people categorized as poor, will make them get appropriate and valuable information to improve their quality of life and be involved in the development and escape poverty. Based on the literature review, Indonesia, as a developing country where the poverty rate is quite high, needs to see opportunities from ICT development in poverty reduction programs. Moreover, the Covid-19 pandemic, which has also expanded the use of ICT in Indonesia, needs to be utilized by creating poverty reduction programs in line with the digital era. ICT utilization should develop various job training to improve their abilities by using digital tools to live more productively in all corners of Indonesia.*

**Keywords:** *poverty, disruption era, utilization of information communication, and technology, sustainable development goals.*

## PENDAHULUAN

Saat ini kita hidup pada zaman *network society*, bentuk yang dibuat oleh masyarakat di era informasi. Era informasi diatur terutama pada produksi dan distribusi informasi serta telah menggantikan paradigma dari era industri, dimana yang diatur adalah produksi dan distribusi dari energi (Fitzpatrick, 2005). Castells dalam Fitzpatrick (2005) menjelaskan *network society* ini dalam enam fitur utama yang dihubungkan dengan keadaan sosial saat ini, transformasi di seluruh dunia.

Pertama, kita memasuki paradigma baru teknologi, berpusat di sekitar mikroelektronika, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta rekayasa genetika. Teknologi informasi merepresentasikan perubahan besar dalam sejarah teknologi dibandingkan dengan revolusi industri. Kedua, kita hidup pada era *new economy* yang dikarakteristikan dalam tiga fitur fundamental, yakni *informational* dalam menghasilkan pengetahuan dan proses atau mengelola informasi. Global dalam arti, aktivitas strategis, memiliki kapasitas untuk bekerja sebagai unit dalam skala besar, serta jaringan. *New Economy* merupakan wujud baru dari kapitalisme yang peraturannya dalam investasi, akumulasi dan *reward* telah berubah secara substansial.

Ketiga, ada bentuk baru dari pekerjaan yang berbasis pada gagasan fleksibilitas seperti pekerja paruh waktu, pekerja sementara, wirausaha, pekerja kontrak, dan lain sebagainya yang mengarah pada pekerjaan menjadi lebih “feminim”. Keempat, budaya saat ini di organisir terutama dalam sistem integrasi dari media elektronik, termasuk namun tidak terbatas hanya pada internet saja. Kelima, munculnya struktur sosial baru terkait dengan konfigurasi

ulang dari waktu dan ruang. Waktu menjadi 'abadi', dan ruang menjadi dinamis. Keenam, Negara mengalami proses transformasi dramatis. Negara membangun kemitraan antara negara-bangsa dan kedaulatan saham untuk mempertahankan pengaruh. Selain itu, negara di era informasi adalah negara jaringan, dan pengambilan keputusan dinegosiasikan antara lembaga-lembaga politik internasional, multinasional, nasional, regional, lokal, dan non-pemerintah.

Perubahan era saat ini yang disebut dengan era disrupsi ini pun menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian tujuan pertama dari *Sustainable Goals Developments* (SDGs) dimana pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi kemiskinan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keberadaan TIK dapat menjadi faktor penting dalam pencapaian SDGs. Perkembangan TIK akan mendorong pencapaian SDGs karena TIK akan mampu mengubah masyarakat, pemerintah, industri, institusi dan juga organisasi selain itu teknologi akan selalu berkembang dan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan manusia (Sachs, et al., 2016). Untuk itu, dalam artikel ini dilakukan tinjauan literatur mengenai konsep kemiskinan, pemanfaatan TIK dalam penanggulangan kemiskinan dan juga penanggulangan kemiskinan di era disrupsi dalam mencapai SDGs di tahun 2030.

## PEMBAHASAN

Masalah sosial yang masih perlu perhatian tinggi di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi kemiskinan memiliki arti yang sangat luas seperti melalui masalah pendidikan, perumahan, kesehatan dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari masyarakat. Banyak

ahli berpendapat jika kemiskinan muncul akibat dari adanya globalisasi dan tidak bisa dihindarkan oleh pemerintahan manapun.

Kemiskinan jika berarti sesuatu maka adalah kebutuhan yang dikategorikan, atau kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia bisa menjalankan fungsinya (Bradshaw, 2003). Kebutuhan ini relatif kepada apa yang mungkin dan berbasis pada definisi sosial serta pengalaman di masa lalu sehingga pemahaman terhadap kemiskinan dapat berbeda-beda, tergantung bagaimana sudut pandang dan pendekatan yang digunakan (Sen, 1999). World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan (Haughton & Khandker, 2009). Kesejahteraan yang dimaksud oleh World Bank disini adalah yang berkaitan dengan komunitas, jadi masyarakat yang dikatakan miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan ataupun konsumsi yang cukup untuk menempatkan mereka pada standar minimum tertentu. World Bank masih menganggap kemiskinan sebagai hal yang berkaitan dengan konsumsi dan pendapatan. Sen (1999) berpendapat selain dilihat berdasarkan pendapatan, kemiskinan juga harus dilihat sebagai deprivasi kapabilitas (sumbernya?).

Sementara itu, Midgley (2014) menjabarkan kemiskinan secara luas sebagai sebuah kondisi material dan deprivasi sosial dimana seseorang berada di bawah standar hidup minimum yang diterima oleh sebuah masyarakat atau mereka yang mengalami deprivasi relatif terhadap kelompok masyarakat lainnya (sumbernya?). Midgley mulai membandingkan jika kemiskinan yang ada di setiap kelompok masyarakat bisa berbeda tergantung dari masyarakat itu dan bagaimana masyarakat atau komunitas lain di sekitarnya. Melihat dari pemahaman mengenai kemiskinan yang didiskusikan, maka kemiskinan dapat disimpulkan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dari segi pendapatan ataupun

kapabilitas dalam memenuhi kebutuhan yang mampu membuatnya berfungsi sebagai manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Agu (2014) membagi kemiskinan menjadi tiga, yaitu: (1) Kemiskinan Pendapatan yakni kurangnya pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan utama; (2) Kemiskinan Kapabilitas yakni dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu hal; dan (3) Kemiskinan Partisipasi yakni kemiskinan dimana seseorang memiliki keterbatasan terlibat dalam suatu hal. Pengertian terkait kemiskinan yang telah dibahas memperlihatkan bahwa terdapat berbagai sudut pandang terkait pengertian kemiskinan, dan kemiskinan tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi tetapi telah berkembang juga pada kemampuan seseorang dalam mengakses informasi.

Sachs (2005:20), membagi kemiskinan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *extreme poverty*, *moderate poverty*, dan *relative poverty*. *Extreme poverty* atau kemiskinan ekstrim adalah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, mereka kelaparan, tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, tidak memiliki air bersih serta tidak mampu mengakses pendidikan. *Moderate poverty* atau kemiskinan moderat adalah kondisi dimana rumah tangga hampir mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. *Relative poverty* atau kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatan rumah tangga berada dibawah pendapatan rata-rata nasional. Pembagian kemiskinan ini masih didasarkan pada sudut pandang kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dan juga kenaikan yang diakibatkan oleh masa Pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, presentase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,64 persen, jumlah ini sempat mengalami

penurunan di tahun 2019 menjadi 9,41 persen. Namun, di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali mencapai angka 10 persen yakni 10,14 persen. Kemiskinan terbesar masih terjadi di perdesaan, dimana terdapat 13,10 persen penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2021 (BPS, 2021a)

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021a) menunjukkan kondisi penduduk miskin perdesaan di Indonesia pada tahun 2020, 62,39 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan 37,66 persen kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan 37,75 persen yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD).

Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa Covid-19, namun jumlah penduduk miskin masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini akan menghambat pencapaian SDGs pada tahun 2030 dimana tidak adanya kemiskinan ekstrem di Indonesia. SDGs merupakan agenda yang ingin dicapai pada tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terkait dengan target untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan juga mengatasi perubahan iklim pada tahun 2030 (Sachs, et al., 2016). Untuk itu, hambatan yang ada pada era saat ini harus dapat diatasi sehingga agenda SDGs dapat dicapai pada tahun 2030.

Pencapaian tujuan pertama pada SDGs yakni penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan adanya pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan merupakan perluasan aset dan kapabilitas dari masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memberi pengaruh, mengontrol, dan memegang tanggung

jawab institusi yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Narayan, 2002).

Terdapat empat elemen kunci pemberdayaan menurut World Bank (Narayan, 2002), salah satunya adalah akses terhadap informasi. Informasi merupakan kekuatan, penduduk yang mendapatkan informasi mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan kesempatan, akses ke layanan yang disediakan, mengetahui dan mendapatkan hak mereka. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat penting dalam pembukaan terhadap akses informasi untuk masyarakat desa. TIK dapat digunakan untuk mengupayakan pemberdayaan agar masyarakat desa mampu untuk mencapai kesejahteraan. TIK mampu untuk membuat kesempatan pemberdayaan ekonomi, sosial dan juga politik untuk masyarakat miskin di negara berkembang (Narayan, 2002).

Berdasarkan pendapat tersebut, TIK dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia, berkembang pesat. TIK di Indonesia mulai berkembang setelah maraknya penggunaan telepon genggam. Data BPS (2015) mencatat sebesar 86,95 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki/menguasai telepon seluler atau telepon genggam. Jumlah ini meningkat lebih dari 30 persen dari tahun 2008 yang mencatat hanya sebesar 51,99 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki/menguasai telepon seluler atau telepon genggam. Lebih lanjut, BPS (2015) mencatat sebanyak 81,33 persen penduduk desa di Indonesia telah menjadi pengguna telepon seluler atau telepon genggam, jumlah ini meningkat hingga 50 persen dari jumlah di tahun 2008 yang berjumlah 38.15 persen.

Berkembangnya penggunaan telepon genggam ini juga mendorong bertambahnya pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan

hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia ini tidak terlepas dari mudahnya akses terhadap internet serta berkembangnya telepon genggam yang mulai beralih ke konsep *smartphone*. Untuk itu, tidak mengherankan jika besarnya angka pengguna internet di Indonesia ini meningkat drastis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia ini didominasi oleh pengguna dalam rentang umur 19-34 tahun yakni sebanyak 49,52 persen. Sementara itu, masih menurut survei APJII (2017) menyatakan penetrasi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikannya akan didominasi oleh lulusan SMA sampai dengan S2/S3. Komposisi pengguna internet berdasarkan level ekonomi menurut APJII (2017) mengungkap bahwa pengguna internet terbanyak berada pada strata ekonomi sosial menengah bagian bawah yakni sebesar 74,62 persen, disusul strata ekonomi sosial menengah bagian atas dengan jumlah 16,02 persen. Level terkecil pengguna internet menurut survei ini mengarah pada strata ekonomi sosial atas dengan 1,98 persen. Hal tersebut menunjukkan, bahwa memang penggunaan TIK belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan dengan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah.

Hampir seluruh responden dalam survei yang dilakukan oleh APJII (2017) ini mengaku menggunakan internet lebih kepada aplikasi untuk gaya hidup seperti *chatting*, media sosial, hingga bermain *game*. Meskipun begitu sebesar 7,39 persen mengaku mengakses layanan perbankan. Terkait durasi penggunaan internet per hari 43,89 persen responden mengaku

menghabiskan waktu 1-3 jam perharinya untuk menggunakan internet. Pemanfaatan internet di bidang ekonomi menunjukkan bahwa 41,04 persen responden memanfaatkan internet untuk membantu pekerjaan, 26,19 persen menggunakan untuk mencari kerja, serta 16,83 persen menggunakan untuk berjualan *online*. Data ini menunjukkan bahwa adanya internet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian karena dapat digunakan mulai dari mencari, membuat, hingga melakukan pekerjaan itu sendiri.

Pemanfaatan penggunaan internet pada bidang pelayanan publik mengungkapkan bahwa 12,15 persen responden menggunakan untuk informasi administrasi serta 9,58 persen menggunakan untuk mengakses layanan pengaduan. Dari bidang sosial sebanyak 16,31 persen responden mengaku menggunakan internet untuk kegiatan amal. Berdasarkan data survei APJII (2017) ini dapat dikatakan bahwa pesatnya penggunaan internet di Indonesia tidak hanya dapat digunakan untuk hal-hal pribadi seperti untuk menunjang gaya hidup, namun dapat juga digunakan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat seperti di bidang ekonomi, pelayanan publik serta sosial.

Pada masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020, juga membuat perkembangan TIK khususnya pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021b), pada tahun 2020 terdapat peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Penetrasi pengguna internet yang pada tahun 2016 hanya 25,37 persen meningkat menjadi 53,73 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang menuntut pembelajaran daring dan juga akses pekerjaan secara daring.

Mendukung perkembangan TIK yang pesat di Indonesia, pada data sosial ekonomi

bulanan yang dirilis Agustus 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Adanya IP-TIK ini berfungsi sebagai alat ukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap atau kesenjangan digital antarwilayah dan mengukur potensi pembangunan TIK. Terdapat 11 indikator yang terbagi pada tiga aspek dalam pengukuran IP-TIK ini. Dari ketiga aspek tersebut, aspek tertinggi di Indonesia pada tahun 2016 adalah pada segi keahlian yang mendapatkan nilai 5,54. Sementara dari segi penggunaan mendapatkan nilai terkecil dengan nilai 3,19. Sedangkan aspek akses dan infrastruktur berada di nilai 4,34 (BPS, 2018). Dari hasil ini dapat dilihat jika penggunaan atau pemanfaatan TIK di Indonesia masih rendah meskipun dari segi keahlian masyarakat sudah meningkat. Rendahnya nilai penggunaan bisa saja dikarenakan masih rendahnya aspek akses dan infrastruktur TIK di Indonesia. Untuk itu, perluasan dan pengembangan terhadap akses dan infrastruktur ini masih terus dilakukan di Indonesia guna untuk meningkatkan aspek keahlian serta penggunaannya.

Indeks IP-TIK ini mengalami perubahan di tahun 2020 yang merupakan masa pandemi Covid-19. Dari tiga aspek pengukuran indeks IP-TIK mengalami peningkatan. Untuk aspek infrastruktur mengalami peningkatan dari tahun 2016, menjadi bernilai 5,67 di tahun 2020. Sementara itu, untuk aspek keahlian juga mengalami peningkatan dari 5,54 di tahun 2016 menjadi 5,92 di tahun 2020. Sedangkan aspek terkait penggunaan yang awalnya hanya 3,19 di tahun 2016 menjadi 5,34 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penggunaan TIK di Indonesia khususnya karena didorong adanya Pandemi Covid-19. (BPS, 2021b)

Keberadaan perubahan teknologi baru pada era disrupsi yang serba digital

menimbulkan berbagai pro dan kontra. Adanya era digital telah memunculkan berbagai *start-up* yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan, seperti dengan adanya kemudahan akses pekerjaan yang *remote*, adanya transportasi *online* yang membuka lapangan pekerjaan baru, serta adanya layanan penggalangan dana *online* yang memudahkan orang untuk membantu satu sama lain tanpa terbatas dengan jarak.

Namun, terdapat juga kontra terhadap keberadaan era disrupsi ini, dimana kesiapan masyarakat yang masih belum mampu untuk mengakses keterampilan baru yang serba digital seperti saat ini. Sehingga, akses lapangan pekerjaan baru tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan. Selain itu, terbukanya akses informasi yang luas juga telah menyebabkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang salah karena kurangnya pengetahuan dalam menyaring informasi yang diterima. Hal ini pun menjadi penyebab meskipun era disrupsi atau era digital ini telah membuat banyak perubahan namun kemiskinan dan ketimpangan masih cukup tinggi di Indonesia.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menyebabkan ketimpangan ini telah memunculkan definisi baru terhadap kemiskinan yang dikenal dengan istilah kemiskinan digital (Cáceres, 2007). Kemiskinan digital adalah kemiskinan dimana seseorang menjadi sebagai orang yang miskin secara digital karena mereka tidak memiliki akses terhadap informasi yang hanya bisa didapat secara digital, tidak memiliki pengetahuan dalam penggunaan alat digital baik *software* maupun *hardware*, serta memiliki pendapatan yang kurang (Cáceres, 2007). Hal ini sejalan dengan kategori kemiskinan yang diungkapkan oleh Agu (2014), dimana terdapat kemiskinan dari segi kapabilitas. Munculnya kemiskinan digital diakibatkan oleh masih

rendahnya kapabilitas seseorang dalam mengakses sumber digital.

Cáceres (2007) mengembangkan kategori kemiskinan dengan kaitannya dalam kemiskinan digital, terdapat empat kategori dari kemiskinan digital ini. Kategori pertama adalah *extremely digitally poor*. Kategori ini merupakan seseorang yang menggunakan teknologi untuk penerimaan informasi saja. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaannya atau kurangnya layanan komunikasi. Namun, dalam kategori ini sekalipun disediakan layanan, orang yang masuk dalam kategori ini akan sulit mengaksesnya karena usia atau kemampuannya untuk menggunakan alat-alat secara digital.

Kategori kedua dari kemiskinan digital adalah *digitally poor*. Kategori ini adalah masyarakat miskin secara digital yang memiliki media komunikasi, sehingga mereka dapat menerima informasi dan dapat berkomunikasi. Namun, penggunaannya masih terbatas karena terbatasnya kapital manusia yang mereka miliki. Kategori selanjutnya adalah *connected people* atau orang yang terhubung, merupakan orang-orang yang memiliki akses internet dan penggunaannya pasif. Ini berarti bahwa akses dan penggunaan internet telah menggantikan jenis informasi tradisional dan telah mengubah cara-cara orang dalam berkomunikasi. Hal ini menuntut perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan cara baru. Kategori terakhir adalah *digitally wealthy*, merupakan kalangan orang-orang yang memiliki akses internet dan menggunakannya secara aktif karena individu dalam kelompok ini memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan transaksi atau untuk memanfaatkan aplikasi elektronik yang disediakan oleh pemerintah, atau bentuk lainnya yang menyiratkan interaksi atau penggunaan aktif dari TIK. (Cáceres, 2007; Susanto, 2016)

Dalam menuju pembangunan sekarang ini, penting untuk melibatkan pemanfaatan TIK sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kategori kemiskinan digital dari seseorang yang *extremely digitally poor* menuju ke *digitally wealthy*. Penggunaan yang tepat terhadap TIK, khususnya akses terhadap internet akan mampu menjadi kunci dalam mengubah hal ini dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, serta pemberdayaan kaum yang kurang beruntung akan menumbuhkan integrasi antara pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Castells, 1999; Chen & Wellman, 2005; Tisdell, 2015). Meskipun begitu, keberadaan TIK tidak selalu baik dan memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur terhadap TIK masih belum mampu menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, serta penggunaan terhadap TIK juga bisa menimbulkan kesenjangan dalam mengakses jaringan sosial dan juga modal sosial yang akan menyebabkan kesenjangan yang lebih besar pada kaum yang kurang beruntung sehingga pembangunan sosial terhambat (Chen & Wellman, 2005).

World Bank (2003) menyatakan TIK memiliki peran penting dalam strategi pembangunan. World Bank (2003) mengklaim TIK telah meningkatkan akses terhadap pasar, meningkatkan efisiensi dan daya saing dari masyarakat miskin, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan jarak jauh. Pemanfaatan terhadap TIK pun memungkinkan kesetaraan gender, karena memudahkan perempuan mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka. Pemanfaatan TIK yang dilakukan tidak hanya diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakan, tetapi ada pemanfaatan TIK yang merupakan inisiatif dari masyarakat sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan

serta untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar mencapai kesejahteraan.

Penyebaran TIK di negara-negara berkembang menyiratkan tidak hanya penyediaan konten yang sesuai dan bermakna bagi masyarakat lokal, namun juga pemahaman yang baik tentang bagaimana TIK digunakan untuk menyebarkan informasi dan mekanisme apa yang mengaktifkan konteks tersebut (Andrade & Urquhart, 2009). Dengan kata lain, TIK jika dimanfaatkan dengan baik akan mampu memainkan peran penting dalam menghubungkan orang miskin dengan informasi, dan juga satu sama lain ataupun dengan masyarakat yang lebih luas (Narayan, 2002). Untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK ini, bergantung terhadap empat kapital, yaitu: 1) adanya akses terhadap kapital informasi; 2) kapital komunikasi; 3) kapital pengetahuan pribumi; dan 4) literasi informasi yang merupakan kemampuan untuk memproses, mengevaluasi, dan mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah (Gigler, 2015).

Lebih lanjut, Gigler mengatakan dalam mengefektifkan pemanfaatan TIK yang ada di masyarakat maka harus mampu meningkatkan kemampuan masyarakat terutama dalam hal *informational capabilities*. Terdapat empat komponen dalam *informational capabilities* ini, (1) untuk menggunakan TIK dengan cara yang efektif, (2) untuk menemukan, memproses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, (3) untuk berkomunikasi secara efektif dengan keluarga, teman, dan orang profesional, dan (4) untuk menghasilkan dan berbagi konten lokal dengan yang lainnya melalui sebuah network. Tanpa adanya kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk dididik, dan untuk dapat menyerap dan memproses informasi yang kompleks maka pemanfaatan yang efektif terhadap keberadaan TIK akan terhambat (Castells, 1999).

Pemanfaatan yang efektif terhadap keberadaan TIK memungkinkan masyarakat miskin mengerti permasalahan mereka dan juga untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. TIK melalui radio dan televisi bisa menyediakan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh mereka, terlebih dengan adanya internet lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sehingga, keberadaan TIK akan mampu untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan. TIK memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik, mencapai transparansi yang lebih besar, menciptakan sumber pendapatan baru, dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat (OECD, 2001). Keunggulan lain yang ditawarkan dari TIK adalah dapat memberikan informasi pasar, memperluas layanan kesehatan, tata pemerintahan yang baik, serta ekspor perangkat lunak (Andrade & Urquhart, 2009).

Pada tahun 2016 lalu, World Bank merilis *World Development Report* (WDR) 2016 dengan mengambil tema Digital Deviden, hal ini dilakukan karena berkembangnya peran dunia digital dalam pembangunan. World Bank mengungkapkan peran dari TIK, khususnya teknologi digital dalam pembangunan. Keberadaan teknologi digital mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan peluang bagi masyarakat khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menguntungkan konsumen. Meskipun begitu, manfaat ini tidak bisa dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat hanya dengan peningkatan akses terhadap internet dan peningkatan *basic* literasi seperti membaca dan menulis. Bagi masyarakat miskin, teknologi digital ini bisa dimaksimalkan manfaatnya dengan meningkatkan produktivitas usaha

rumah tangga, produktivitas petani, serta sektor informal. Dampak pemanfaatan TIK oleh masyarakat miskin memang masih rendah, namun memiliki potensi tinggi khususnya dalam peningkatan produktivitas pekerja serta menguntungkan konsumen.

Sementara itu, Agu (2014) menyebutkan ada beberapa cara pemanfaatan TIK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya: memberikan akses informasi di tingkat komunitas dengan menyediakan *telecenter* yang menyediakan akses terhadap informasi seperti pertanian, mata pencaharian, serta pendidikan kesehatan; menargetkan program untuk kelompok yang termarginalkan seperti wanita dan disabilitas dengan cara menghubungkan mereka melalui TIK; mempromosikan kewirausahaan lokal ataupun Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal, adanya TIK bisa menjadi alat yang mendukung kewirausahaan lokal dengan menghubungkan mereka dengan pasar; meningkatkan kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan melalui konsultasi secara *online* ataupun dengan mengumpulkan data kesehatan; penguatan pendidikan melalui pemanfaatan televisi dan radio, biaya yang rendah serta jangkauan yang luas dari radio dan televisi memungkinkan penyampaian pendidikan hingga ke daerah terpencil, dan *telecenter* bisa menjadi sarana penyampaian pembelajaran jarak jauh dan pendidikan virtual; mendukung *good governance* dengan meningkatkan akses terhadap layanan pemerintah melalui adanya *e-governance*; peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui pengenalan terhadap TIK dengan mengajarkan kepada masyarakat pedesaan cara untuk mengakses dan menggunakan TIK yang bisa memberikan manfaat terhadap mereka, seperti pemasaran produk dan mencari pekerjaan; mendukung pertanian dengan memungkinkan petani mendapatkan akses ke pasar serta

informasi terkait bisnis pada waktu yang tepat dan efisien, hal ini dicapai dengan memberikan informasi yang berguna kepada petani dalam bentuk perawatan tanaman dan peternakan, pupuk dan bahan baku, mitigasi kekeringan, pengendalian hama, irigasi, peramalan cuaca, sumber bibit atau benih dan harga pasar; menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan dengan memungkinkan masyarakat pedesaan mendapatkan akses terhadap pekerjaan *online*; memperkuat mobilisasi sosial dengan membuat penduduk desa diajak bersama-sama untuk membahas isu-isu pembangunan daerah yang menjadi kepentingan bersama dan untuk membuat strategi pembangunan lokal; memungkinkan adanya konektivitas antar produsen pertanian di pedesaan.

Dari cara-cara pemanfaatan TIK tersebut diatas, hal yang terpenting adalah terbukanya akses terhadap TIK oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, sehingga mereka mampu mendapatkan informasi yang tepat guna dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka serta terlibat dalam pembangunan. Namun, terbukanya akses terhadap TIK tidak cukup untuk mencapai keberhasilan intervensi TIK mengingat bahwa TIK untuk pembangunan bukan hanya masalah penyediaan TIK saja. Perhatian terhadap masalah adanya kesenjangan digital harus dipertimbangkan saat membuka akses terhadap TIK, khususnya pertimbangan akan pemeriksaan struktur sosial, masalah sosial, organisasi sosial, serta hubungan sosial. (Andrade & Urquhart, 2009)

Pemanfaatan TIK dalam penerapan suatu kebijakan memang masih menjadi pro-kontra khususnya di Indonesia. Era saat ini, yang juga disebut dengan era disrupsi, menurut Kasali (2017) setidaknya ada lima perubahan yang mempengaruhi dalam mengambil kebijakan yaitu dimana saat ini untuk menentukan arah kebijakan misalnya data yang digunakan bukanlah lagi *data time series* atau analisis

terhadap data-data masa lalu untuk memprediksi data masa depan tetapi data yang digunakan adalah data *real time*. Dimana ketika terjadi perubahan data saat itu, data itulah yang digunakan untuk mengambil langkah kebijakan (*data driven policy*). Tidak hanya itu, perubahan terhadap kepemilikan ekonomi dimana jika sebelumnya untuk membuat sebuah bisnis maka kita harus memiliki semuanya sendiri atau menciptakan modal sendiri tetapi dalam era ini tidak lagi seperti itu. Konsep *sharing economy* sudah mulai digalakkan dimana dalam membentuk suatu usaha kita tak harus memilikinya sendiri tetapi memanfaatkan sumber daya dari aset-aset konsumtif yang terbuka untuk digunakan bersama. Untuk itu, dalam mengambil kebijakan diperlukan juga *disruption* yakni sebuah inovasi yang menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.

Melihat besarnya potensi TIK yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa seharusnya hal ini dapat dijadikan peluang untuk merumuskan kebijakan khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Farell & Rumich (2002) mengungkapkan peningkatan kapasitas dan akses terhadap TIK di negara miskin akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Ahmed (2013) dalam penelitiannya mengatakan peningkatan kapasitas terhadap TIK berguna untuk mempromosikan *human development* dan meningkatkan kapabilitas seseorang untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Sementara itu Kivunikea, et.all (2011), mengungkapkan jika dalam melihat peran dari TIK dalam kaitannya dengan kualitas hidup dapat menggunakan pendekatan kapabilitas. Penelitian tersebut mengungkapkan jika adopsi TIK oleh masyarakat miskin khususnya di

pedesaan masih dalam tahap awal serta masih terbatasnya kesadaran akan potensi TIK terhadap kualitas hidup. Untuk itu, kebijakan terhadap TIK diharapkan tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi juga mempertimbangkan untuk memperluas kesadaran dan agensi masyarakat untuk keuntungan pembangunan.

Pemanfaatan TIK untuk menanggulangi kemiskinan di era disrupsi ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya pendataan penduduk miskin melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang merupakan aplikasi untuk mengelola data penduduk miskin di Indonesia agar mereka mendapatkan program perlindungan sosial yang sesuai. Selain itu, dalam pemberian bantuan perlindungan sosial, pemerintah sudah tidak lagi memberikan bantuan secara konvensional namun menggunakan layanan perbankan. Sehingga, program perlindungan sosial dapat langsung diterima oleh penerima manfaat. Namun, hal ini tentunya belum cukup, perlu adanya pengembangan program pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong Indonesia mencapai target SDGs 2030 dimana tidak adanya lagi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

## PENUTUP

Era disrupsi merupakan era yang ditandai oleh perkembangan TIK yang cepat menuntut masyarakat dan pemerintah untuk siap menghadapi disrupsi yang mengikuti perubahan sosial. Oleh karena itu, perkembangan TIK perlu dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berbagai *best practice* yang telah dilakukan di berbagai negara dengan memanfaatkan TIK dalam program perlindungan sosial ataupun program penanggulangan kemiskinan perlu dipelajari.

Hal ini diarahkan untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut dilakukan di Indonesia untuk mencapai tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi perlu melihat peluang dari perkembangan TIK dalam program penanggulangan kemiskinan. Dorongan dari adanya Pandemi Covid-19 yang juga telah memperluas penggunaan TIK di Indonesia perlu dimanfaatkan dengan membuat program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan era digital. Program penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan diantaranya dengan membuat portal pekerjaan yang dapat diakses secara digital sehingga memungkinkan orang bekerja dari mana saja sesuai dengan keahliannya. Selain itu, pemanfaatan TIK digunakan untuk berbagai pelatihan pekerjaan dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan penggunaan alat-alat digital untuk hidup lebih produktif di seluruh pelosok Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Politeknik Kesejahteraan sosial Bandung atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agu, & N., M. (2014). Enhancing the Effectiveness of Poverty Reduction Initiative using Information Technology. *Computing, Information Systems Development Informatics & Allied Research Journal*, 5 (1), 9 - 16.
- Ahmed, A., & Al-Roubaie, A. (2013). Poverty reduction in the Arab world: the use of ICTs. *World Journal of Science, Technology, and Sustainable Development*, 10(3), 195 - 211.

- Andrade, A. E., & Urquhart, C. (2009). The Value of Extended Networks: Social Capital in an ICT Intervention in Rural Peru. *Information Technology for Development*, 15(2), 108-132.
- APJII. (2017). *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Statistik Telekomunikasi 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi: Agustus 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021b). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020*. Jakarta: BPS.
- Bradshaw, J., & Finch, N. (2003). Overlaps in dimensions of poverty. *Journal of Social Policy*, 32(4), 513 - 525.
- Bradshaw, T. K. (2007). Theories of poverty and anti-poverty program in community development. *Journal of the Community Development Society*, 38(1), 7 - 25.
- Cáceres, R. B. (2007). *Digital Poverty: Concept and Measurement, with an Application to Peru*. Working Paper #337, March 2007.
- Castells, M. (1999). *Information Technology, Globalization and Social Development*. UNRISD Discussion Paper, 114.
- Chen, W. & Wellman, B. (2005). *Minding the Cyber-gap: the Internet and Social Inequality*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Farell, E., & Rumich, M. (2003). Effective application of ICT to improving the quality of life and reducing poverty in poor countries: recent experiences and new approaches. IEEE 2002 International Symposium on Technology and Society (ISTAS'02). *Social Implications of Information and Communication*

- Technology. Proceedings* (Cat. No.02CH37293).
- Fitzpatrick, Tony. (2005). *New Theories of Welfare*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Gigler, B.-S. (2015). *Development as freedom in a digital age: experiences of the rural poor in Bolivia*. Washington DC: World Bank.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook of poverty and inequality*. Washington DC: World Bank.
- Kasali, Rhenald. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kivunikea, F. N., Ekenberga, L., Danielsona, M., & Tusubira, F. (2011). Perceptions of the role of ICT on quality of life in rural communities in Uganda. *Information Technology for Development*, 17(1), 61-80.
- Midgley, J. (2014). *Social development: theory and practice*. Los Angeles: SAGE.
- Narayan, Deepa, (ed.). (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*. Washington D.C: The World Bank.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2001). *Understanding the digital*. Paris: OECD.
- Sachs, J. (2005). *The end of poverty: how we can make it happen in our lifetime*. New York: Penguin Press.
- Sachs, J. D., Modi, V., Figueroa, H., Fantacchiotti, M. M., Sanyal, K., Khatun, F., & Shah, A. (2016). *ICT & SDGs*. The Earth Institute, Columbia University, and Ericsson.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New Delhi: Oxford.
- Susanto, A. (2016). Analisis Kondisi Digital Poverty di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 6(2), 169-184.
- Tisdell, C. (2017). Information technology's impacts on productivity and welfare: a review. *International Journal of Social Economics*, 44(3), 400-413.
- World Bank. (2003). *ICT and MDGs: a world bank group perspective*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: digital dividen*. Washington DC: World Bank